

Kajian Transformatif Trias Politika dalam Demokrasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Swasta di Malang.

Lidia Nora Putarata¹, Engelbertus Kukuh Widijatmko², Andri Fransiskus
Gultom³

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
putaranora@gmail.com¹, kukuhwidijatmoko@gmail.com²

ABSTRACT

Indonesia is a legal state that operates a democratic system and makes the people the highest authority. Democracy implemented in Indonesia uses the political triad concept, namely the division of power into three axes. However, the people as the holders of the highest power are now starting to have little awareness of participating in democracy. This of course has a negative impact on the life of democracy in Indonesia. So, it is important to have outreach that discusses the role of the people in democracy. Socialization can be done in various ways and in any place, including educational places. In education, socialization can be carried out by implementing the same democratic system as Indonesia and making the target of socialization the executor of the course of democracy. However, the most strategic and appropriate level of education to carry it out is at the student level. Students are the most appropriate level because they are the highest level of education and are also the young generation who are ready to be prepared to enter politics. So, researchers conducted research to find out the effect of implementing the trias politica system in a higher education environment on community participation in politics itself. Researchers use qualitative research methods to explain the depth of the problem being studied. Researchers also use a case study approach to obtain and collect data in research, for example finding a system for implementing the trias politica concept in revitalizing democracy among students, especially private university students in the city of Malang.

Keywords: *democracy, political triad, socializatio*

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menjalankan system demokrasi dan menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi yang dijalankan di Indonesia menggunakan konsep trias Politic yaitu pembagian kekuasaan ke dalam tiga poros. Akan tetapi, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tersebut kini mulai minim kesadaran untuk berpartisipasi kedalam demokrasi. Hal ini tentunya mempunyai dampak negatif bagi hidupnya demokrasi di negara Indonesia. Maka menjadi penting adanya sosialisasi yang membahas tentang peranan rakyat di dalam demokrasi. Sosialisasi dapat di lakukan dengan berbagai cara dan juga pada tempat manapun, begitu pula pada tempat Pendidikan. Pada tempat Pendidikan, sosialisasi dapat di lakukan dengan menerapkan sistem demokrasi yang sama dengan negara Indonesia dan menjadikan target sosialisasi sebagai eksekutor dari jalannya demokrasi tersebut. Akan tetapi tingkat Pendidikan yang paling strategis dan tepat untuk menjalankannya adalah pada tingkatan mahasiswa. Mahasiswa adalah tingkatan paling tepat karena tingkat tertinggi dari Pendidikan dan juga generasi muda yang matang untuk di persiapkan terjun kedalam politik. Maka, peneliti melakukan penelitian untuk menemukan pengaruh penerapan sistem trias politika di lingkungan perguruan tinggi terhadap partisipasi masyarakat kedalan politik itu sendiri. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan kedalaman masalah yang diteliti. Peneliti juga

menggunakan pendekatan studi kasus untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penelitian, sebagai contoh menemukan sistem penerapan dari konsep trias politika dalam menghidupkan demokrasi di kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa perguruan tinggi swasta di kota Malang.

Kata kunci: demokrasi, trias politic, sosialisasi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi jalannya demokrasi. Maksud dari negara hukum ialah bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelegaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (Azhary, 2020: 30). Demokrasi yang dimaksud ialah yang mana demokrasi yang meletakkan kekuasaan tertinggi bukan hanya pada tangan satu orang saja, Indonesia menggunakan konsep dengan meletakkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat karena berasaskan atas kedaulatan rakyat, hal ini dapat dilihat dari pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.

Akan tetapi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi hari-hari ini mengalami penurunan kesadaran akan pentingnya partisipasi mereka ke dalam demokrasi itu sendiri. (Manginut dkk, 2023) berpendapat bahwa Banyak yang menilai bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam politik pada saat pemilihan. Padahal sejatinya dalam kehidupan berdemokrasi, masyarakat mempunyai hak untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa. Hal ini di buktikan dengan data The Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2020 menunjukkan bahwasanya Indeks demokrasi Indonesia pada tahun tersebut menduduki skor 6,3. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2021) menjelaskan, sulit untuk menentukan satu momen spesifik yang menunjukkan pemerintah tidak lagi demokratis, mengingat bahwa proses penurunan tersebut bermanifestasi secara perlahan, serta terjadi dalam langkah-langkah yang nyaris tidak tampak.

Perjalanan demokrasi Indonesia, seringkali dimaknai secara sempit sebagai kredo dari, oleh, dan untuk rakyat. Konsekuensinya kredo ini lebih cenderung bersifat memaksa rakyat untuk memahami sistem demokrasi itu sendiri serta rakyatnya tentunya masih banyak yang belum memahami esensi dari demokrasi sehingga cenderung masih memperlihatkan ciri otoriter atau totaliter. Dalam perkembangannya sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam persatuannya. Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi

Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa. Indonesia di masa yang akan datang diharapkan tidak akan mengulangi lagi sistem pemerintahan otoriter yang membungkam hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kehidupan yang demokratis dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu diterapkan demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga warga negara yang demokratis (Arfendi, dkk. 2022)

Partisipasi sering dibicarakan dalam analisis politik modern dan erat hubungannya dengan sistem demokratis yang menekankan kedaulatan rakyat. Rendahnya tingkat partisipasi dianggap sebagai masalah dalam negara-negara demokratis karena dapat mengurangi kualitasnya. dan sebaliknya. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran di kalangan masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka didalam demokrasi yang tidak terlepas dari politik. Kesadaran ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya Pendidikan politik, sosialisasi dan cara-cara lainnya. Karena Kesadaran warga Negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik (mhd Ilham Hidayat Rastami & Halking, 2023).

Muhamad mulyadi (2019) menjelaskan beberapa faktor yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat ke dalam politik itu sendiri berdasarkan hasil penelitian pada pemilihan umum tahun 2019. Pertama, peran media sosial yang secara terus-menerus membentuk opini kepada masyarakat agar memberikan hak suaranya ketika pemilu. Data yang bersumber dari We Are Social dan Hootsuite menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia sebesar 132 juta orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa setengah atau lebih dari 50% penduduk Indonesia telah bisa mengakses internet. Pengguna media sosial mencapai 49% persen populasi pengguna internet di Indonesia. Fakta dengan meningkatnya angka pengguna media sosial ini, pada akhirnya telah membawa persaingan baru bagi partai politik dan kandidat dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu serentak 2019. Kedua, tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat yang baik, kedewasaan berpolitik dan bernegara dari rakyat yang baik, serta adanya kepercayaan pada pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta Pemilu, Parpol, Caleg, dan calon perwakilan daerah. Kesadaran demokrasi sejak dini bisa dan harus terus dilakukan oleh berbagai kalangan, terutama oleh pemerintah, parpol, dan komponen penyelenggara pemilu. Hal ini penting sebagai upaya terus menerus dan berkelanjutan untuk membangun bangsa dengan menciptakan iklim demokrasi yang bersih, sehat dan cerdas sedari dini, guna mengetahui hak-hak dan kewajiban warga negara terutama dimulai dari kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa. Ketiga, daya pikat pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2019 terutama bagi kalangan milenial juga sangat menentukan dalam menaikkan grafik angka pemilih. Hal ini bisa dipahami karena polarisasi yang terbentuk oleh dua kubu selalu menampilkan kampanye program yang berbeda. Bagi

kubu petahana apa yang sudah dilakukan sebelumnya adalah sebuah prestasi yang harus dilanjutkan, namun sebaliknya bagi kubu penantang berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh petahana tidak efektif dan efisien sehingga menawarkan program-program baru yang dapat diterima oleh masyarakat pemilih.

Terlepas dari tiga hal yang telah dipaparkan mengenai hal yang dapat meningkatkan Penyeradaran pentingnya partisipasi masyarakat didalam demokrasi ini juga dapat dilaksanakan secara maksimal dengan sosialisasi yang bersifat melibatkan masyarakat yang merupakan target penyeradaran itu sendiri sebagai pelaku dari politik yang berjalan di dalam suatu negara. Masyarakat akan mengerti penting partisipasinya didalam demokrasi ketika ia bukan lagi hanya sebagai penonton tetapi sebagai tokoh dari demokrasi itu sendiri. Sosialisasi seperti ini dapat dilakukan di bidang masyarakat manapun, namun bidang paling tepat untuk melakukan penyeradaran ini ialah pada bidang Pendidikan. Karena Pendidikan adalah akar rumput atau landasan utama dari seseorang untuk berpikir. Tetapi tidak semua jenjang Pendidikan layak untuk menerapkan system penyeradaran seperti ini, karena masih terbilang berat dan juga keras jika diterapkan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah. Melihat hal tersebut maka, jenjang Pendidikan paling strategis dan paling layak untuk menerapkan sistem penyeradaran semacam ini adalah pada jenjang Perguruan Tinggi. Sejatinya mahasiswa adalah agen dari perubahan suatu bangsa, bahkan bung Karno sebagai Presiden pertama dan bapak proklamator Indonesia, mempunyai harapan besar pada mahasiswa terhadap suatu perubahan dengan mengatakan “seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang muda bisa mengubah dunia.” Menjadikan mahasiswa sebagai tokoh dan juga pelaku dari demokrasi yang berjalan adalah cara penyeradaran yang strategis, karena jenjang perguruan tinggi merupakan jenjang terakhir mempersiapkan orang muda untuk terlibat langsung ke masyarakat.

Setiap perguruan tinggi mempunyai tata cara dan juga sistem demokrasi yang berbeda-beda yang di terapkan untuk menarik simpati dan juga daya kritis mahasiswanya, begitupun perguruan-perguruan tinggi yang ada di kota Malang. Sebagian besar perguruan tinggi yang ada di kota Malang menerapkan sistem politik yang cukup menarik, tidak terkecuali salah satu Universitas Swasta di kota Malang. Universitas Swasta di kota Malang ini merupakan salah satu kampus yang menerapkan sistem politik “Trias Politika”, karena dinilai paling cocok untuk membangkitkan semangat demokrasi dari mahasiswa. Sistem trias politik juga merupakan sistem politik negara kita Indonesia, sistem yang menerapkan konsep pembagian kekuasaan menjadi tiga bagian dengan tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Dengan sistem pembagian kekuasaan seperti ini juga dapat menghindari adanya kekuasaan yang hanya dipegang oleh satu orang saja, dan demokrasi itu dapat benar-benar hidup.

Witarji dan Sianturi(2022) menjelaskan Trias Politica merupakan suatu konsep yang dicetuskan oleh Montesquieu yang merupakan seorang pemikir politik dari Negara Prancis, konsep ini juga ditulis Montesquieu dalam bukunya yang berjudul “L'Esprit des Lois”. Pada awalnya konsep ini dikemukakan oleh John Locke yang membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif dan federatif lalu pada tahun

1748 konsep kekuasaan dari John Locke ini disempurnakan lagi oleh Baron de Montesquieu menjadi Trias Politica. Penerapan sistem trias politik pada Universitas Swasta di Malang itu sendiri terbilang sudah cukup lama di terapkan, karena memasuki tahun ke 18 sejak di ditetapkan sebagai sistem politik mahasiswa Universitas tersebut pada tahun 2006 di barengi dengan lahirnya Undang-undang Persatuan Mahasiswa Universitas atau biasa dikenal oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas tersebut dengan singkatan UU PMUK. Selama 18 tahun penerapan sistem tersebut, tentunya semua melalui dinamika yang juga tidak selamanya stabil.

Sehubungan dengan penerapan sistem trias politik pada salah satu Universitas Swasta di Malang, jika dihubungkan dengan usaha meningkatkan partisipasi masyarakat didalam demokrasi tentunya ada keterkaitan. Maka berdasarkan pertimbangan peneliti mengenai hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara lebih dalam dengan tema **“Kajian Transformatif trias politika dalam Demokrasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Swasta di Malang”**.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian penelitian sebelumnya. Peneliti menemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada penerapan sistem trias politika di tingkat kenegaraan. Peneliti juga menemukan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada struktural penerapan sistem trias politika. Sedangkan, pada penelitian kali ini peneliti berfokus kepada penerapan sistem dress politika di kampus Universitas Swasta tersebut dan dampak dari penerapan sistem trias politika pada minat masyarakat untuk berpartisipasi ke dalam politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian “Kajian transformatif trias politika dalam demokrasi kemahasiswaan Universitas Swasta di Malang” menggunakan metode penelitian kualitatif. Agar penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan oleh peneliti, perlu adalah metode penelitian yang digunakan dan dapat di buktikan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. (Waruwu 2023) menjelaskan bahwa Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan peneliti untuk mengetahui pengaruh dan pemahaman mahasiswa Universitas swasta di Malang mengenai Trias Politica. Menurut Creswell (2013) metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang terkait dengan gejala sosial serta melakukan interpretasi data yang diperoleh. “Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan.

Peneliti menggunakan studi kasus sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Studi Kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris “Case Study” atau “. Kata “Kasus” diambil dari kata “Case” yang artinya ialah kajian atau peristiwa. Sedangkan

“Study” mempunyai arti belajar, mempelajari, meneliti, dan menganalisis, dalam kata lain case study adalah mempelajari suatu kejadian, situasi, peristiwa atau disebut dengan fenomena sosial yang bertujuan untuk mengungkap kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat didalam kasus yang diteliti. (Nursapia Harahap, 2020). Metode penelitian studi kasus merupakan strategi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang menggunakan pokok pertanyaan penelitian *how* atau *why*, sedikit waktu yang dimiliki peneliti untuk mengontrol peristiwa yang diteliti, dan fokus penelitiannya adalah fenomena kontemporer, untuk melacak peristiwa kontemporer. Pada metode studi kasus, peneliti fokus kepada desain dan pelaksanaan penelitian. (Ratna Dewi Nur'aini, 2020). Maka, metode penelitian studi kasus adalah strategi yang sangat tepat untuk digunakan dalam beberapa konteks penelitian tertentu. Berikut adalah jabaran mengenai mengapa metode studi kasus sesuai dengan kriteria yang ada:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sistem Trias Politika pada Salah satu Universitas Swasta di kota Malang

A. Pengertian

Sistem trias politika merupakan suatu sistem pembagian kekuasaan ke dalam tiga poros atau tiga bagian. Pembagian kekuasaan didalam sistem trias politika antara lain adalah eksekutif, yudikatif dan legislatif. Sebagian besar negara di dunia menggunakan sistem trias politika, begitupun Indonesia. Indonesia menjalankan sistem trias Politika yang dikemukakan oleh Montesqueu, akan tetapi tidak di terapkan secara absolut karena di Indonesia sendiri menambahkan kekuasaan eksaminatif sebagai kekuasaan tambahan.

Konsep suatu negara demokrasi adalah di mana seluruh warga negaranya mempunyai keterlibatan aktif di dalam demokrasi itu sendiri. Karena di dalam menjalankan suatu demokrasi, Indonesia menjadikan rakyat Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Indonesia menjunjung jalannya demokrasi dengan menggunakan konsep pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak kewajiban, kedudukan, dan kekuatan yang sama di dalam menghidupkan dan menjalankan demokrasi di Indonesia itu sendiri. Akan tetapi dalam melaksanakan demokrasi tidak semua warga negara memiliki kesadaran yang sama, maka menjadi penting untuk diadakan penyadaran. Penyadaran yang dapat dilakukan salah satunya adalah menjadikan target penyegaran sebagai pelaku dan tokoh dari demokrasi itu sendiri. Misalnya menjalankan sistem demokrasi dan sistem politik yang sama di dalam lembaga pendidikan, terkhususnya perguruan tinggi.

Universitas swasta di Malang merupakan salah satu Universitas yang menerapkan demokrasi dan demokrasi di Universitas tersebut banyak diakui karena dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya organisasi ekstra mahasiswa dengan doktrin-doktrin yang berbeda-beda, sebagai salah satu pendukung perpolitikan di kalangan mahasiswa Universitas tersebut.

Sistem politik yang berjalan di kalangan mahasiswa universitas swasta tersebut menganut sistem trias politika, suatu sistem politik yang sama dengan yang diterapkan oleh negara Indonesia. Sistem trias politika pada mahasiswa swasta di Malang ini, menggunakan pembagian dengan 3 poros kekuasaan. Pembagian kekuasaan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut: Pertama, Eksekutif, Yang berkuasa sebagai Eksekutif pada pemerintahan Mahasiswa Universitas swasta di Malang tersebut dikenal dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa mempunyai kedudukan tertinggi dari seluruh organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di bawah naungan PGRI kanjeruhan Malang. Badan Eksekutif Mahasiswa unikama mempunyai ketua dan wakil ketua yang dikenal dengan presiden dan wakil presiden mahasiswa. Bayu Aji Kurniawan & Yohanis Franz La Kahija (2024) menjelaskan bahwa Salah satu organisasi kemahasiswaan yang ada di tingkat perguruan tinggi adalah BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang merupakan organisasi di bidang eksekutif. BEM juga memiliki fungsi sebagai wadah pembelajaran politik, diskusi, penggalan ideologi, pengabdian masyarakat, penelitian, kewirausahaan hingga eskalasi pergerakan massa. BEM memiliki program kerja yang dilaksanakan selama satu periode kepengurusan. Pembuatan program kerja disusun oleh pemimpin organisasi melalui pembuatan grand design organization yang kemudian akan dibahas dengan seluruh pengurus dalam rapat kerja. Pemimpin organisasi sangat menentukan kualitas program kerja dan arah gerak organisasi. Kedua, legislatif. Yang berkuasa sebagai legislatif pada pemerintahan mahasiswa universitas swasta di Malang tersebut dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Kedua lembaga ini tergabung ke dalam lembaga tinggi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa sebelumnya, akan tetapi mempunyai kedudukan di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa. Ketiga, Yudikatif. Yang berkuasa sebagai yudikatif pada pemerintahan mahasiswa Universitas Swasta di Malang tersebut dikenal dengan mahkamah mahasiswa. Mahkamah mahasiswa merupakan salah satu lembaga yang tergabung ke dalam lembaga tinggi mahasiswa Universitas tersebut. Posisi presiden mahasiswa dalam sebuah organisasi kemahasiswaan memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan visi organisasi sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan presiden. Merumuskan rencana organisasi bukanlah hal yang bisa dilakukan secara sembarangan oleh seorang presiden mahasiswa. Dibutuhkan pengalaman dan kualitas individu yang baik agar dapat memimpin dengan efektif dalam sebuah organisasi besar. Tugas dan wewenang

Dalam menjalankan sistem politik unikama, empat organisasi tersebut berjalan dengan tugas yang berbeda-beda. Tugas dari setiap lembaga tinggi mahasiswa tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Badan Eksekutif Mahasiswa

Sebagai perwakilan mahasiswa yang mempunyai kedudukan tertinggi sebagai eksekutor dan fasilitator dari aspirasi-aspirasi mahasiswa. Maksud dari Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai eksekutor dan fasilitator

dari berbagai aspirasi mahasiswa ya itu di mana Badan Eksekutif Mahasiswa bekerjasama dengan dewan perwakilan mahasiswa yang akan melakukan penyerapan aspirasi lalu dieksekusi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa melalui prosedur-prosedur yang ada. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kegiatan yang telah diselenggarakan oleh dewan perwakilan mahasiswa pada Universitas tersebut yang melakukan penyerapan aspirasi dan mengundang seluruh elemen mahasiswa pada universitas swasta tersebut. Kemudian aspirasi tersebut diserahkan oleh dewan perwakilan mahasiswa kepada Badan Eksekutif Mahasiswa. Setelah Badan Eksekutif Mahasiswa menerima aspirasi yang telah diserahkan oleh dewan perwakilan mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan Jalan Terbaik dari persoalan dan aspirasi yang telah dikumpulkan. Sebelum sampai ke titik audiensi tentunya Badan Eksekutif Mahasiswa akan melakukan mediasi dengan petinggi-petinggi kampus yang berwenang untuk memberikan jawaban dan juga perubahan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa di universitas swasta tersebut. Apapun yang menjadi hasil mediasi antara pihak Badan Eksekutif Mahasiswa dengan petinggi-petinggi kampus akan disampaikan kepada seluruh mahasiswa, yang kemudian diputuskan bersama seluruh mahasiswa untuk tindakan lanjut.

b. Dewan perwakilan mahasiswa

Berdasarkan undang-undang persatuan mahasiswa pada Universitas swasta di Malang tersebut tahun 2019, DPM memiliki fungsi serta tugas sebagai berikut:

Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama.

1. Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa pengganti undang-undang.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja persatuan mahasiswa Universitas Swasta Malang, serta kebijakan BEM.
3. Membahas dan Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan persatuan mahasiswa Universitas Swasta di Malang yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.
4. Mengajukan atau menganjurkan, memberikan persetujuan, pertimbangan atau konsultasi dan pendapat.
5. Menyerap, menghimpun, menampung dan Menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, dan.
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang dasar persatuan mahasiswa Universitas Swasta di Malang dan undang-undang.

c. Majelis Permusyawaratan mahasiswa

MPM bertanggung jawab sebagai pengawas terhadap berjalannya kegiatan unit organisasi mahasiswa di Universitas Swasta di Malang. Mereka juga memiliki peran dalam mengumpulkan dan meneruskan aspirasi yang dimiliki mahasiswa di universitas tersebut. Di sisi lain, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), sebagai bagian dari lembaga legislatif, memiliki tugas yang lebih difokuskan pada pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja setiap organisasi mahasiswa di bawah naungan Universitas tersebut.

MPM berfungsi sebagai lembaga kontrol yang memastikan bahwa organisasi mahasiswa beroperasi sesuai dengan tujuan dan aturan yang ditetapkan. Mereka mengawasi implementasi kebijakan, penggunaan dana, dan pencapaian tujuan organisasi mahasiswa untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitasnya. Selain itu, MPM juga menjadi saluran bagi aspirasi mahasiswa dengan mengumpulkan masukan, usulan, atau keluhan dari mahasiswa untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang berwenang atau ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Dengan demikian, peran MPM dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) saling melengkapi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kegiatan dan representasi mahasiswa di lingkungan Universitas Swasta di Malang. MPM mengontrol dan mengawasi bukan hanya unit kegiatan mahasiswa atau Himpunan Mahasiswa program studi, tetapi juga semua bagian dari organisasi mahasiswa termasuk lembaga tinggi mahasiswa.

MPM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua elemen organisasi mahasiswa, termasuk unit kegiatan mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa program studi, serta lembaga tinggi mahasiswa, beroperasi sesuai dengan peraturan dan tujuan yang ditetapkan. Mereka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, serta pencapaian tujuan organisasi mahasiswa secara umum. Hal ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek kegiatan dan keputusan yang diambil oleh organisasi mahasiswa.

Dengan adanya pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh MPM terhadap seluruh elemen organisasi mahasiswa, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif untuk pengembangan potensi mahasiswa serta terjaminnya efektivitas dan keberlanjutan dari setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa di Universitas Swasta di Malang tersebut.

d. Mahkamah Mahasiswa

Mahkamah Mahasiswa (MM) adalah lembaga kehakiman yang memiliki otoritas tertinggi dalam persatuan mahasiswa di Universitas Swasta di Malang. MM memiliki kewenangan untuk menyelesaikan dan memberikan putusan atas berbagai permasalahan yang muncul di kalangan mahasiswa. Fungsi MM menjadi penting ketika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh lembaga tinggi mahasiswa lainnya. Sebagai lembaga kehakiman tertinggi, MM berperan dalam menegakkan keadilan dan

memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa antara mahasiswa. Mereka menerapkan proses yang adil dan mengacu pada hukum yang berlaku di lingkungan kampus. Putusan yang diberikan oleh MM diharapkan untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan dan mendapatkan pengakuan dari seluruh komunitas mahasiswa sebagai penyelesaian yang adil. MM juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pihak manapun di dalam atau di luar kampus. Hal ini penting untuk memastikan integritas proses hukum dan kepercayaan masyarakat mahasiswa terhadap lembaga kehakiman di dalam perguruan tinggi.

Kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh Majelis Mahasiswa (MM) memiliki posisi yang setara dengan Mahkamah Agung di negara Indonesia. Tugas utama MM adalah menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa internal mahasiswa dengan cara yang adil, serta berdasarkan pada hukum yang berlaku di lingkungan kampus mereka. Peran MM sangat penting dalam konteks kampus karena mereka bertindak sebagai badan yang memastikan bahwa setiap masalah atau konflik yang muncul di antara mahasiswa diselesaikan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kekuasaan kehakiman MM:

Pertama Kedudukan Setara dengan Mahkamah Agung, Seperti Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, MM memiliki wewenang untuk mengadili dan menegakkan keputusan dalam sengketa di lingkungan kampus. Mereka dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam hal penyelesaian sengketa internal mahasiswa.

Kedua Penegakan Keadilan, MM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keputusan yang mereka buat didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Ini berarti mereka harus mempertimbangkan semua fakta yang relevan, mendengarkan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan yang tidak memihak.

Ketiga Penyelesaian Sengketa Internal, MM fokus pada menyelesaikan sengketa di antara mahasiswa. Sengketa ini bisa meliputi perselisihan akademik, masalah disiplin, atau konflik interpersonal antar mahasiswa. Kemampuan mereka untuk menangani berbagai jenis masalah ini adalah kunci untuk menjaga kedamaian dan ketertiban di lingkungan kampus.

Keempat Berlandaskan Hukum, Keputusan MM harus selalu berdasarkan pada hukum dan regulasi yang berlaku di lingkungan kampus. Mereka tidak boleh bertindak sembarangan atau melanggar hak asasi mahasiswa dalam proses penegakan hukum mereka.

Kelima Transparansi dan Akuntabilitas, MM harus beroperasi secara transparan, artinya proses pengambilan keputusan mereka dan alasan di balik keputusan tersebut harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini

penting untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas mereka di kalangan mahasiswa dan staf akademik.

Dengan demikian, MM memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa norma-norma hukum dan keadilan ditegakkan di dalam lingkungan kampus, sehingga setiap individu memiliki keadilan yang sama dalam menghadapi masalah atau sengketa. Dengan demikian, Mahkamah Mahasiswa bukan hanya sebagai penengah sengketa tetapi juga sebagai simbol otoritas kehakiman yang memastikan tata kelola organisasi mahasiswa yang sehat dan berkeadilan di Universitas Swasta di Malang. Seluruh tugas fungsi serta wewenang dari setiap lembaga tinggi mahasiswa ini diatur di dalam undang-undang persatuan mahasiswa Universitas Swasta di Malang tersebut atau yang biasa dikenal dengan undang-undang pmuk. Kehidupan seluruh elemen organisasi mahasiswa pada universitas swasta tersebut diatur di dalam undang-undang terluka tersebut dan disahkan oleh petinggi-petinggi kampus salah satunya adalah Rektor. Penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap peserta didik di satuan pendidikan berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan penalarannya. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menerima layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kemampuannya dalam bidang minat, bakat, serta penalaran. Pasal 14 dari UU Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa pengembangan minat, bakat, dan penalaran mahasiswa dilakukan melalui kegiatan kurikuler, kegiatan kokurikuler sebagai pendukung proses pendidikan, dan kegiatan ekstrakurikuler sebagai aktivitas yang dijalankan melalui organisasi kemahasiswaan. Pasal 77 juga menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan adalah entitas internal di perguruan tinggi yang mendapatkan pengakuan hukum dari pimpinan perguruan tinggi. Sebagai lembaga dengan otoritas tertinggi, keempat lembaga tinggi mahasiswa bertanggung jawab sebagai penghubung antara mahasiswa dan institusi melalui prosedur yang diatur dalam peraturan undang-undang.

B. Sistem pemilihan

Mirip dengan sistem demokrasi nasional, untuk memegang jabatan dalam lembaga tinggi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa dan dewan perwakilan mahasiswa, calon harus terpilih melalui proses pemilihan umum. Pemilihan umum ini diatur dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM), yang dibentuk oleh dewan perwakilan mahasiswa melalui proses pendaftaran. Setiap anggota KPUM harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang organisasi kemahasiswaan.

KPUM berperan sebagai lembaga independen yang tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk administrasi kampus. Mereka bertugas untuk memastikan proses pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, KPUM memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan integritas dan kepercayaan dalam sistem pemilihan umum di lingkungan perguruan tinggi.

Presiden mahasiswa dipilih oleh seluruh mahasiswa melalui mekanisme pemilihan umum raya (PEMIRA) yang diselenggarakan secara independen oleh mahasiswa. Itulah yang membedakan presiden mahasiswa dengan ketua organisasi lainnya. Bila Presiden Mahasiswa dipilih secara langsung oleh seluruh mahasiswa, ketua organisasi lainnya hanya dipilih oleh anggotanya. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dapat mencalonkan diri sebagai Presiden Mahasiswa untuk kemudian mengikuti mekanisme yang ada. Mahasiswa yang ingin mencalonkan diri menjadi Presiden Mahasiswa memiliki berbagai alasan, salah satunya adalah kecintaannya terhadap bangsa. Keinginan untuk membuktikan rasa cintanya pada bangsa ditunjukkan dengan mengabdikan diri menjadi Presiden Mahasiswa. Sebagai presiden mahasiswa, memaknai nasionalisme adalah menghayati perasaan bangga dan cinta yang mendalam terhadap bangsa Indonesia, yang tercermin dalam tindakan nyata. Ini melibatkan beberapa aspek penting: Pertama Identitas Bangsa, Presiden mahasiswa menganggap identitas sebagai bangsa Indonesia sebagai sesuatu yang bernilai tinggi dan membanggakan. Ini mencakup keberagaman budaya, sejarah panjang, dan semangat persatuan yang menjadi bagian dari kebanggaan nasional.

Kedua, Patriotisme, Memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan siap berkorban untuk kepentingan negara. Presiden mahasiswa mempromosikan semangat patriotisme di antara sesama mahasiswa, mendorong mereka untuk berperan aktif dalam membangun dan memajukan Indonesia.

Ketiga, Partisipasi dalam Pembangunan Nasionalisme bagi presiden mahasiswa tidak hanya berhenti pada perasaan bangga semata, tetapi juga tercermin dalam kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Ini dapat berupa kegiatan sosial, proyek-proyek pembangunan, atau advokasi terhadap isu-isu nasional yang penting.

Keempat, Keberagaman dan Persatuan, Menyadari pentingnya keberagaman sebagai kekuatan bangsa, presiden mahasiswa mempromosikan toleransi, menghargai perbedaan, dan memupuk persatuan di tengah-tengah mahasiswa. Hal ini merupakan bagian integral dari nasionalisme yang inklusif dan progresif.

Kelima Pendidikan dan Kesadaran Nasional, Menggunakan posisi sebagai presiden mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme di kalangan mahasiswa. Melalui pendidikan dan diskusi, presiden mahasiswa membantu mahasiswa memahami nilai-nilai nasionalisme dan bagaimana hal itu dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, presiden mahasiswa tidak hanya merasakan bangga sebagai warga Indonesia, tetapi juga bertanggung jawab untuk menginspirasi dan memimpin mahasiswa dalam mengamalkan nilai-nilai nasionalisme dalam tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.. Rasa bangga sebagai warga Indonesia dimulai dengan memahami potensi dan tantangan yang dihadapi negara, yang kemudian dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap bangsa. Menurut presiden mahasiswa, nasionalisme memiliki relevansi yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara yang dapat diambil sebagai bentuk nasionalisme adalah dengan aktif ikut serta dalam proses pemilihan umum. Ini menunjukkan komitmen untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan masa depan negara melalui pemilihan pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat.

Seluruh alur dan persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden mahasiswa serta dewan perwakilan mahasiswa diatur oleh kpum, tetapi dengan dasar pmuk. Sebelum membuka pendaftaran, KPUM akan melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi ini dilakukan untuk menjelaskan persyaratan serta deadline seluruh alur pendaftaran hingga pemilihan. Pemilihan juga dilakukan seperti pemilihan umum yang diterapkan di negara Indonesia. KPUM sebagaimana dimaksud di sini sama seperti KPU yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2012.

Pada masa-masa pesta demokrasi Universitas Swasta di Malang tersebut, mahasiswa yang biasa di golongkan sebagai aktivis akan mempersiapkan diri untuk menyambut masa-masa tersebut. Karena sistem trias politika yang diterapkan pada Universitas Swasta di Malang tersebut memiliki sistem Trias Politika yang sama seperti yang telah Negara Indonesia terapkan saat ini. ketua dewan perwakilan mahasiswa di universitas swasta tersebut berpendapat bahwa “ Universitas swasta tersebut merupakan salah satu kampus yang menerapkan sistem trias politika paling baik dan sistemnya paling mendekati sistem yang di terapkan Indonesia.

Hasil penerapan sistem Trias Politika di salah satu Universitas Swasta di Malang pada partisipasi masyarakat didalam demokrasi (khususnya kalangan mahasiswa Universitas tersebut).

Dalam rangka membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi di dalam demokrasi, melalui diterapkan sistem trias politika di tingkat universitas sangat mempunyai dampak yang sangat besar. Dampak dari penerapan system trias politika di kalangan mahasiswa itu sendiri dapat dilihat, sebagai berikut.

Pertama, antusias mahasiswa dalam mengikuti pemilu raya ditingkat Universitas pada Universitas Swasta tersebut. Mahasiswa pada Universitas tersebut memiliki antusias yang tinggi dalam mengikuti jalannya demokrasi pada kampus tersebut, dibuktikan dengan pemilu Raya yang pernah menjadi bahan perbincangan pada tahun 2020. Pada masa pemilihan presiden dan wakil presiden mahasiswa pada Universitas Swasta tersebut tahun 2020 sempat menjadi bahan perbincangan dikota

Malang karena demokrasi yang terbilang keras dan juga panas untuk tingkat mahasiswa.

Kedua, keminatan mahasiswa dalam mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden mahasiswa. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, mahasiswa pada kampus swasta tersebut memiliki calon presiden dan wakil presiden mahasiswa lebih dari satu kandidat. Hal ini membuktikan bahwa keminatan mahasiswa saat itu sangat besar untuk berpolitik. Walaupun beberapa tahun kemudian mengalami kemunduran peserta yang mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden mahasiswa. Namun, antusias dari para aktivis di Universitas Swasta tersebut tetap ada, dibuktikan dengan pemilihan ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa yang sangat banyak peminatnya. Walaupun, dalam perjalanannya banyak juga yang tereliminasi secara data Ketika pendaftaran.

Ketiga, keaktifan para aktivis yang menduduki ruang-ruang strategis di Universitas Swasta tersebut. Ruang-ruang strategis yang dimaksud di sini adalah presiden mahasiswa & wakil presiden Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan ruang-ruang strategis lainnya. Para aktivis tersebut terlibat aktif untuk mengamati setiap persoalan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan bahkan turut ikut andil untuk bersuara dalam menyuarakan suara rakyat yang terbungkam oleh sistem. Karena Mahasiswa sebagai Social Control harus mampu bersikap kritis terhadap apa yang terjadi di pemerintahan, kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh aparat negara yang semula ingin mensejahterakan rakyat malah semakin menyengsarakan rakyat (Tutik, 2020). Tidak hanya sampai di situ para aktivis tersebut juga ikut andil dalam memperjuangkan setiap aturan-aturan yang di rasa kurang sesuai dengan kepentingan masyarakat umum. Tentunya setiap hal yang diperjuangkan oleh para aktivis tersebut dilakukan tidak hanya semata bersuara, akan tetapi melalui procedural yang ada dan melalui kajian-kajian yang matang. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat karena mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akan membawa arah perubahan dan perkembangan sosial. Bangsa yang unggul dimulai dari generasi muda yang memiliki karakter yang kuat, seperti disiplin, penghargaan terhadap pencipta alam semesta, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, bertanggung jawab, mampu berpikir kritis, dan inovatif. Disiplin adalah landasan yang penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dan potensinya secara maksimal. Dengan disiplin, mahasiswa dapat menghormati nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari serta menghargai lingkungan sekitar. Penghargaan terhadap pencipta alam semesta mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan keberlangsungan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana menekankan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Mahasiswa juga perlu mampu berpikir kritis, yaitu mampu menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang rasional. Kemampuan berpikir kritis ini sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam masyarakat modern. Kemampuan berinovasi adalah kunci untuk menghasilkan solusi-solusi baru yang dapat meningkatkan

kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemajuan sosial. Dengan karakter yang memadai seperti ini, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memajukan bangsa dan membangun masa depan yang lebih baik untuk semua orang.

Fenomena perkembangan dan perubahan tersebut menuntut peranan penting mahasiswa, mahasiswa diharapkan bukan sebagai pengamat saja, namun dalam peran ini mahasiswa juga dituntut sebagai pelaku dalam masyarakat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa merupakan bagian masyarakat sosial. Fenomena perkembangan sosial tersebut sangat menarik untuk diperhatikan lebih dalam, oleh sebab itu tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan mahasiswa terhadap perubahan lingkungan sosial masyarakat. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki karakter positif akan mampu bersaing dengan generasi-generasi cerdas lainnya baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Mahasiswa memiliki peran yang penting sebagai kontrol politik dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Mereka berperan dalam meningkatkan kesadaran politik dengan memberikan wawasan dan penyadaran kepada masyarakat untuk aktif mengawasi dan mengontrol pemerintah dalam membuat kebijakan publik atau kebijakan politik. Hal ini penting karena kebijakan-kebijakan ini secara langsung mempengaruhi nasib dan kehidupan masyarakat luas. Mahasiswa berfungsi sebagai agen penyadaran dengan memberikan informasi yang obyektif dan analisis yang mendalam tentang kebijakan publik kepada masyarakat. Mereka membantu dalam menjelaskan berbagai aspek sosial-politik dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat memahami implikasi dan konsekuensinya dengan lebih baik. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan sebagai mediator atau penyambung lidah antara pemerintah dan masyarakat. Mereka membantu membangun keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan kebutuhan masyarakat dalam proses kebijakan. Dengan demikian, peran mahasiswa dalam political control tidak hanya memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat, tetapi juga memperkuat sistem demokratis dengan menjaga transparansi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini dapat dilihat dengan antusias dari mahasiswa Universitas Swasta di Malang tersebut dalam menyambut pesta demokrasi mahasiswa. Banyak mahasiswa yang memahami sistem pemerintahan dan sistem politik yang ada di Indonesia melalui sistem yang dijalankan langsung di Universitas Swasta di Malang tersebut. Hal ini juga diungkapkan oleh Presiden mahasiswa Universitas tersebut bahwa "Penerapan sistem Trias Politika ini dilingkungan kampus tersebut menunjukkan banyak mahasiswa yang memiliki minat untuk terlibat didalam politik".

KESIMPULAN

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Keterlibatan aktif masyarakat sangatlah penting dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi. Salah satu cara efektif untuk membangun kesadaran demokrasi di masyarakat adalah melalui pendidikan. Pendidikan demokrasi yang dimulai sejak dini, seperti melibatkan pelajar dalam praktik langsung demokrasi, dapat membentuk

pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai, proses, dan partisipasi dalam demokrasi.

Sebagai contoh, di salah satu Universitas Swasta di Kota Malang, mahasiswa memiliki peran aktif dalam menjalankan sistem demokrasi di lingkungan kemahasiswaannya. Mereka diberikan kebebasan penuh untuk berpartisipasi dalam proses keputusan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, tanpa campur tangan dari pihak lain atau otoritas kampus. Hal ini membantu mahasiswa memahami dan menginternalisasi konsep demokrasi dalam konteks Indonesia.

Dengan demikian, partisipasi aktif mahasiswa dalam demokrasi kemahasiswaan tidak hanya memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat kampus, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin yang memahami dan mampu menjalankan prinsip-prinsip demokrasi di berbagai sektor masyarakat setelah mereka lulus.

Penerapan sistem trias politica atau pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki dampak yang signifikan terhadap niat demokrasi mahasiswa. Berikut ini beberapa dampak utamanya:

Pertama, Peningkatan Keterlibatan dan Partisipasi. Sistem trias politica mendorong mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi di lingkungan kampus. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan (legislatif), melaksanakan keputusan (eksekutif), serta menegakkan aturan dan keadilan (yudikatif). Hal ini mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam berbagai aspek kehidupan kampus yang demokratis.

Kedua, Pembelajaran tentang Prinsip Demokrasi. Melalui pengalaman langsung dalam menjalankan fungsi-fungsi dari sistem trias politica, mahasiswa belajar mengenai prinsip-prinsip demokrasi seperti akuntabilitas, transparansi, dan checks and balances. Mereka memahami pentingnya kontrol dan keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, Pengembangan Keterampilan Kepemimpinan. Mahasiswa yang terlibat dalam sistem trias politica mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang penting untuk kehidupan mereka di masa depan. Mereka belajar untuk bekerja dalam tim, mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan membuat keputusan yang baik dan berdasarkan prinsip demokratis.

Keempat, Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi. Sistem trias politica membantu memperkuat nilai-nilai demokrasi di kalangan mahasiswa, seperti toleransi, menghargai pendapat orang lain, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini penting untuk membentuk generasi pemimpin yang kompeten dan bertanggung jawab di masa depan.

Kelima, Menjadi Agens Perubahan Sosial. Dengan memahami dan mengimplementasikan sistem trias politica, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan sosial yang efektif dalam masyarakat luas. Mereka dapat menerapkan nilai-nilai demokrasi yang dipelajari dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.

Secara keseluruhan, penerapan sistem trias politica dalam konteks demokrasi mahasiswa memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap pembentukan

karakter dan niat demokrasi mahasiswa. Sistem trias politica terdiri dari tiga cabang kekuasaan yang independen: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Diterapkan di lingkungan kampus, hal ini memiliki dampak yang mendalam dalam mempersiapkan mahasiswa sebagai warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan berkompeten dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan, meliputi beberapa aspek kunci berikut:

Pertama, Pendidikan Politik dan Kesadaran Kewarganegaraan. Mahasiswa yang terlibat dalam sistem trias politica mendapatkan pendidikan politik yang praktis. Mereka belajar tentang struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan yang demokratis, serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ini membantu mereka mengembangkan kesadaran kewarganegaraan yang kuat dan memahami pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Kedua, Pengembangan Kepemimpinan dan Keterampilan Manajerial. Melalui peran dalam badan legislatif atau eksekutif mahasiswa, mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang vital. Mereka belajar untuk mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan, dan mengimplementasikannya dengan efektif. Hal ini tidak hanya membantu dalam konteks kampus, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk peran kepemimpinan di masyarakat secara lebih luas.

Ketiga, Penegakan Keadilan dan Hukum. Keberadaan lembaga yudikatif, seperti Majelis Mahasiswa dalam beberapa kasus, mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya keadilan dan penegakan hukum. Mereka belajar untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan transparan, serta menghormati proses hukum dalam mengambil keputusan.

Keempat, Pengembangan Keterampilan Komunikasi dan Negosiasi. Dalam menjalankan tugas legislatif atau eksekutif, mahasiswa belajar untuk berkomunikasi dengan baik dan bernegosiasi dengan berbagai pihak. Ini membantu mereka membangun keterampilan untuk bekerja sama, mencapai konsensus, dan mengelola konflik dengan konstruktif.

Kelima, Pembentukan Karakter Demokratis. Selain keterampilan dan pengetahuan yang konkret, penerapan sistem trias politica juga membentuk karakter mahasiswa dalam nilai-nilai demokrasi. Mereka belajar untuk menghargai pluralisme, menghormati hak individu, dan memperjuangkan keadilan sosial. Ini membentuk dasar moral yang kuat dalam partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat.

Secara keseluruhan, sistem trias politica di lingkungan kampus tidak hanya menciptakan struktur yang demokratis dan efisien, tetapi juga mendidik mahasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab dan berkompeten. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi tantangan dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan dengan memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mereka peroleh selama masa studi mereka. Dengan demikian, penerapan sistem ini merupakan langkah penting dalam membentuk generasi mahasiswa yang tidak hanya cerdas akademis, tetapi juga berdedikasi untuk memajukan demokrasi dan keadilan di Indonesia dan di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfenti A, dkk (2022). Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Dalam Berdemokrasi: *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022*. Balikpapan.
- Argentina, dkk (2022). Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam Berdemokrasi. *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022*:Balikpapan.
- Ayu L,dkk. (2024). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2024. *Jurnal Cendekia Mengabdikan Berinovasi dan Berkarya*. Sulawesi Tengah.
- Bayu A & Yohanis S (2024). Pengalaman Menjadi Presiden Mahasiswa Studi Kualitatif Fenomenologi Pada Presiden Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Di Jawa Tengah. *Jurnal Empati*. Semarang.
- Gilang A (2021). Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif: *Jurnal Mediapsi*. Surabaya.
- M Fajar (2021). Kemunduran Demokrasi Dan Kebebasan Pers Di Asia Tenggara. *Jurnal Penelitian Politik*. Surabaya.
- Mengihut S, dkk (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mempertahankan Desa Mandiri (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. *Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*. Surabaya.
- Muhammad, R(2021). Memahami desain metode penelitian Kualitatif..21(no.1).54. *Humanika, kajian Ilmiah Mata kuliah Umum*. Yogyakarta.
- Ni Ketut A (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Bali.
- Reynaldi J & Stefanus S (2020). Eksistensi Penerapan Trias Politica Dalam Pemisahan Kekuasaan Yang Sejajar Beserta Dampaknya Terhadap Kekuatan Lembaga Negara Independen. 50, *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*. Semarang.
- Ruhendra, dkk (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy*.Bandung.